



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 8 (Delapan)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 23 Januari 2017
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam mengawasi kinerja Perusahaan/ Direksi. 2. Optimalisasi peran Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Rapat	: Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: A. 15 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 4 orang izin B. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 14.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

2. Komisi IX DPR RI meminta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan data real jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor fomal dan informal.
3. Komisi IX DPR RI meminta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan data pengelolaan investasi dana BPJS Ketenagakerjaan secara reguler kepada Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPRRI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan terkait perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
5. Komisi IX DPRRI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk melengkapi data-data terkait kepesertaan, aset, dan investasi kepada Komisi IX DPR RI sebelum RDP dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada Rabu, 25 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.
6. Komisi IX DPRRI meminta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjan untuk mendorong Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyelesaikan permasalahan system informasi dan teknologi di BPJS Ketenagakerjaan
7. Komisi IX DPR RI meminta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan agar bersama-sama dengan direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengalokasikan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan sebanyak 5 juta pekerja tidak mampu.
8. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan fasilitas stimulus program JKK, JKM terhadap seluruh pekerja honorer di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, DPD, dan MPR RI selama 3 (tiga) bulan.

Rapat diakhiri pukul 17.50 WIB

**KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,**

DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., MA

A-460